



RENCANA KERJA [RENJA] TAHUN 2018

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor komunikasi dan informasi yang efisien dan efektif, terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan komunikasi dan informasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor komunikasi dan informasi di Kota Probolinggo.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu dasar dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Probolinggo, Agustus 2017

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Probolinggo

REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670711 198809 1 001

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 4 |
| BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PROBOLINGGOTAHUN LALU | 5 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD | 5 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 8 |
| 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Kota Probolinggo | 8 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran | 8 |
| 3.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran | 10 |
| BAB IV PENUTUP | 14 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Tahun Keempat dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kota Probolinggo dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.

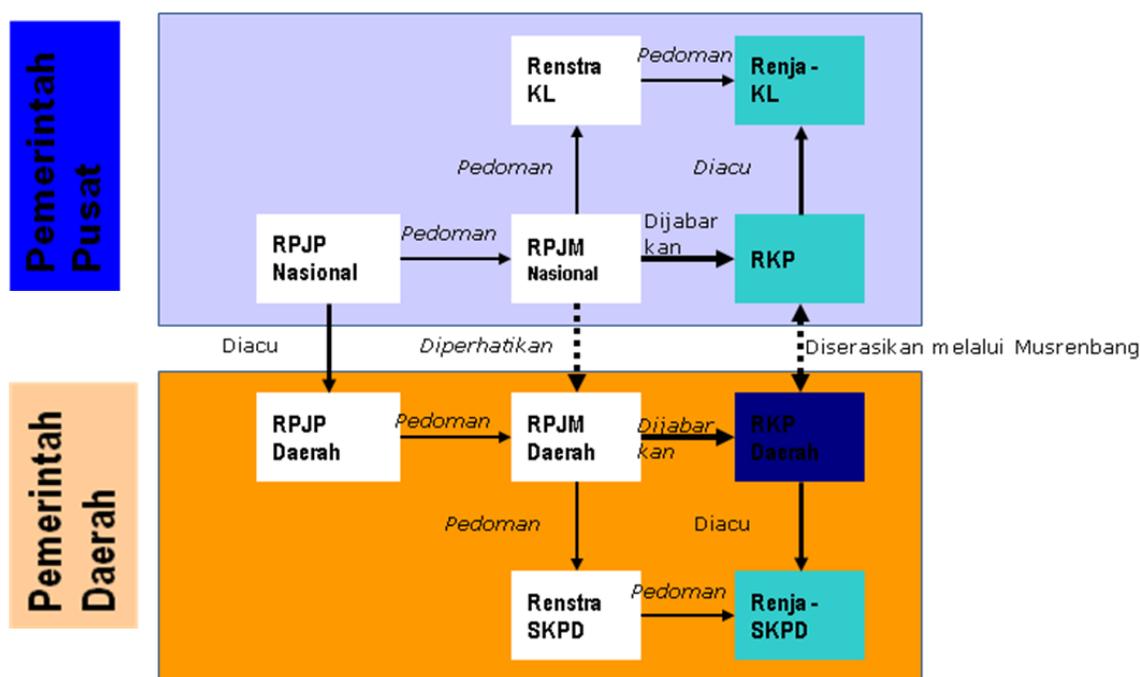
Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusa. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Probolinggo.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka

ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Bila digambarkan dalam bentuk diagram, maka keterkaitan antara dokumen Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan di bidang komunikasi dan informatika. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi, yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Probolinggo. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan Pagu Anggaran yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah:

| No | Program dan Kegiatan | ANGGARAN | REALISASI | % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.213.084.700,00 | 1.108.614.072,00 | 91,39 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 67.515.300,00 | 60.848.780,00 | 90,13 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 280.440.000,00 | 225.663.250,00 | 80,47 |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 99.900.000,00 | 94.475.000,00 | 94,57 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 37.500.000,00 | 37.266.500,00 | 99,38 |
| | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 445.800.000,00 | 445.639.508,00 | 99,96 |
| | Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan | 281.929.400,00 | 244.721.034,00 | 86,80 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 624.795.200,00 | 571.822.882,00 | 91,52 |
| | Pengadaan Mebeleur | 57.700.000,00 | 49.431.200,00 | 85,67 |
| | Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi | 111.782.200,00 | 99.857.100,00 | 89,33 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 210.000.000,00 | 202.809.500,00 | 96,58 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 33.540.000,00 | 28.433.006,00 | 84,77 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 87.823.000,00 | 81.210.026,00 | 92,47 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi | 49.450.000,00 | 37.625.000,00 | 76,09 |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll) | 74.500.000,00 | 72.457.050,00 | 97,26 |

| No | Program dan Kegiatan | ANGGARAN | REALISASI | % |
|----|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 128.077.000,00 | 108.853.900,00 | 84,99 |
| | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll | 70.000.000,00 | 67.153.900,00 | 95,93 |
| | Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional | 58.077.000,00 | 41.700.000,00 | 71,80 |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 130.000.000,00 | 129.406.371,00 | 99,54 |
| | Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 30.000.000,00 | 29.632.000,00 | 98,77 |
| | Pelaksanaan Studi Banding/Kunjungan Kerja/dll | 100.000.000,00 | 99.774.371,00 | 99,77 |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 36.588.000,00 | 29.762.000,00 | 81,34 |
| | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | 12.138.000,00 | 8.083.000,00 | 66,59 |
| | Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Penatausahaan Keuangan SKPD | 14.340.000,00 | 12.014.000,00 | 83,78 |
| | Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya | 10.110.000,00 | 9.665.000,00 | 95,60 |
| 6 | Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik | 16.592.000,00 | 15.688.000,00 | 94,55 |
| | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 16.592.000,00 | 15.688.000,00 | 94,55 |
| 7 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 4.521.352.486,00 | 4.246.209.160,00 | 93,91 |
| | Penerbitan Tabloid Daerah | 141.952.500,00 | 125.737.500,00 | 88,58 |
| | Pengolahan Komunikasi Radio | 680.943.286,00 | 638.763.865,00 | 93,81 |
| | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Masyarakat | 109.522.500,00 | 96.370.342,00 | 87,99 |
| | Operasional Jaringan LAN dan WAN | 1.941.441.050,00 | 1.827.450.256,00 | 94,13 |
| | Operasional Website | 29.995.000,00 | 22.585.150,00 | 75,30 |
| | Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Telematika | 123.750.000,00 | 107.801.000,00 | 87,11 |
| | Penyediaan Sistem Keamanan Data dan Informasi | 421.950.000,00 | 407.538.576,00 | 96,58 |
| | Pembinaan dan Pengembangan e-Government | 518.409.400,00 | 497.125.101,00 | 95,89 |
| | Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) | 553.388.750,00 | 522.837.370,00 | 94,48 |
| 8 | Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi | 1.798.938.300,00 | 1.707.093.208,00 | 94,89 |
| | Penyajian dan Evaluasi Data dan Informasi | 99.000.000,00 | 89.024.280,00 | 89,92 |
| | Pengolahan Data Elektronik | 848.411.000,00 | 791.620.628,00 | 93,31 |
| | Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) | 229.346.300,00 | 210.342.600,00 | 91,71 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Aplikasi Layanan Publik | 622.181.000,00 | 616.105.700,00 | 99,02 |
| 9 | Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa | 54.000.000,00 | 53.904.000,00 | 99,82 |
| | Kerja Sama Penyiaran Radio dan Televisi | 54.000.000,00 | 53.904.000,00 | 99,82 |

| No | Program dan Kegiatan | ANGGARAN | REALISASI | % |
|----|--|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 10 | Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik | 1.073.823.500,00 | 1.021.070.350,00 | 95,09 |
| | Sosialisasi Kebijakan Melalui Media Luar Ruang (Running Text, Spanduk, Baliho, Banner Dll) | 181.000.000,00 | 179.238.950,00 | 99,03 |
| | Sosialisasi Kebijakan Melalui Tatap Muka dan Dialog Publik | 242.532.000,00 | 227.259.000,00 | 93,70 |
| | Pelayanan Informasi Pada Masyarakat | 388.325.000,00 | 373.542.500,00 | 96,19 |
| | Peningkatan Pemberdayaan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 33.706.500,00 | 29.745.000,00 | 88,25 |
| | Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) | 25.525.000,00 | 24.527.500,00 | 96,09 |
| | Pertunjukan Rakyat Kelompok Informasi Masyarakat (PERTURA KIM) | 202.735.000,00 | 186.757.400,00 | 92,12 |
| 11 | Program Peningkatan Pelayanan Persandian | 50.300.000,00 | 42.381.000,00 | 84,26 |
| | Pengelolaan Pengamanan dan Pengiriman Materi Persandian | 50.300.000,00 | 42.381.000,00 | 84,26 |
| 12 | Program Pengembangan Aplikasi Informatika | 187.961.814,00 | 185.293.214,00 | 98,58 |
| | Implementasi Open Source | 187.961.814,00 | 185.293.214,00 | 98,58 |
| 13 | Program Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi | 83.950.000,00 | 79.878.984,00 | 95,15 |
| | Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi | 83.950.000,00 | 79.878.984,00 | 95,15 |
| 14 | Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Pos dan Telekomunikasi | 87.290.000,00 | 69.225.000,00 | 79,30 |
| | Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi | 68.250.000,00 | 68.213.000,00 | 99,95 |
| | Pengembangan Ducting Bersama | 19.040.000,00 | 1.012.000,00 | 5,32 |
| | JUMLAH | 10.006.753.000,00 | 9.369.202.141,00 | 93,63 |

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja tahun 2016 dan diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sebesar 93,39%. Dengan capaian kinerja sebesar 93,63% tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Kota Probolinggo

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Probolinggo. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Probolinggo, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur, RPJM Provinsi Jawa Timur, RKPD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kota Probolinggo dan RKPD Kota Probolinggo.

Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut:

“ Kota Probolinggo Maju, Sejahtera dan Berkeadilan ”

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2015 – 2019, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

- Misi I : Membangun Masyarakat Kota Probolinggo yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
Misi ini adalah untuk menciptakan sosok masyarakat Kota Probolinggo tahun 2019, yakni masyarakat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit membangun dan siap untuk berkompetisi.
- Misi II : Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan
Misi ini adalah untuk menciptakan sosok perekonomian Kota Probolinggo tahun 2019, yakni sosok perekonomian Kota Probolinggo yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya, kokoh dan kuat dalam menghadapi berbagai turbulensi perekonomian namun tetap berorientasi pada perekonomian yang berkeadilan.
- Misi III : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Perluasan Partisipasi Publik
Misi ini adalah untuk menciptakan sosok Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2019, yakni sosok pemerintahan yang berkinerja tinggi, profesional dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, amanah dan demokratis.

Misi IV : Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan

Misi ini untuk menciptakan sosok Kota Probolinggo Tahun 2019 yang telah terpenuhi infrastruktur kota yang mampu dan siap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Misi V : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal

Misi ini untuk menciptakan sosok kehidupan masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2019 yang harmonis melalui peningkatan peran generasi muda, pembinaan olah raga, pengembangan seni budaya serta pengembangan rasa kesetiakawanan sosial terutama bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sesuai tugas pokok yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan lima tahunan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo mengacu pada:

Misi ketiga :

Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Perluasan Partisipasi Publik

Misi ini adalah untuk menciptakan sosok Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2019, yakni sosok pemerintahan yang berkinerja tinggi, profesional dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, amanah dan demokratis.

3.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis stratejik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Adapun Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
3. Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan telekomunikasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika
4. Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan telekomunikasi

3.3 Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

1. Kebijakan

Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional.

Sehubungan dengan pengertian diatas, kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah Dinas Komunikasi dan informatika Kota Probolinggo;
2. Peningkatan pelayanan;
3. Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik melalui SIMAYA pada Dinas Komunikasi dan informatika Kota Probolinggo ;
4. Peningkatan pelayanan publik;
5. Peningkatan sosialisasi dan arah kebijakan pelayanan informasi kepada masyarakat;
6. Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan media massa bidang layanan informasi.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan bidang komunikasi, pos dan telekomunikasi.
9. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima;
10. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal;
11. Menyediakan dan menyebarkan informais yang bermanfaat melalui internet pada faslitas publik;
12. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengembangan komunikasi dan informatika serta teknologi pendukung sehingga meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi tersebut;
13. Melaksanakan reformais birokrasi melalui pengadaan secara elektronik;
14. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;
15. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
16. Pengembangan pelayanan informasi publik;
17. Pengaturan / regulasi penggunaan infrastruktur telematika.

Kebijakan diatas diimplementasikan dalam bentuk penerapan standar operasi prosedur (SOP), yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, pengaturan mekanisme kegiatan lanjutan dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai pendorong motifasi bagi staf dalam melaksanakan tugas.

2. Program

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tusi dari masing-masing bidang;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kota Probolinggo yang tertuang pada RPJMD Kota Probolinggo,
- c. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- d. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- e. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Pemerintah Kota Probolinggo.

Program dimaksud oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo telah disusun sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8. Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi
9. Program Sosialisasi Kebijakan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Dengan Media Massa
10. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
11. Program Peningkatan Pelayanan Persandian
12. Program Pengembangan Aplikasi Informatika
13. Program Penataan, Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi
14. Program Peningkatan dan Pelayanan Bidang Pos dan Telekomunikasi

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2018 sebagai berikut:

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
 - Pengadaan Mebeleur
 - Pengadaan Alat Kantor, alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor, alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi
 - Pemeliharaan rutin/berkala taman dan bangunan lainnya (tempat parkir, pos penjagaan, gerbang dan pagar, pavingisasi dll)
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
 - Penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
 - Bimbingan teknis/workshop/ sosialisasi/seminar implementasi peraturan perundang-undangan
 - Pelaksanaan Studi Banding/Kunjungan Kerja/DII
5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
 - Penyusunan perencanaan anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penatausahaan keuangan SKPD
6. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
 - Pengelolaan media sosial pemerintah daerah
 - Sosialisasi kebijakan melalui tatap muka dan dialog publik
 - Penyajian aspirasi pada ruang publik digital
 - Badan koordinasi hubungan masyarakat (BAKOHUMAS)
 - Peningkatan pemberdayaan peran kelompok informasi masyarakat (KIM)
 - Pertunjukan rakyat kelompok informasi masyarakat (PERTURA KIM)
 - Peran serta pemerintah daerah dalam pekan KIM Jawa Timur
 - Kerjasama penyiaran radio dan televisi
 - Pemuatan pemberitaan advetorial sponsor artikel dan rubrik khusus media massa

7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 - Sosialisasi kebijakan melalui media luar ruang (running text, spanduk, baliho, banner dll)
 - Pelayanan informasi pada masyarakat
 - Penerbitan tabloid daerah
 - Penerbitan media internal
 - Operasional website
 - Penyajian dan evaluasi data dan informasi
 - Pengolahan komunikasi radio
8. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERSANDIAN
 - Pengelolaan pengamanan dan pengiriman materi persandian
9. PROGRAM PENATAAN, PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 - Penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi
10. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
 - Operasional jaringan LAN dan WAN
 - Pengolahan data elektronik
 - Pengelolaan sistem elektronik
 - Penyediaan sistem keamanan data dan informasi
11. PROGRAM PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 - Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
12. PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN BIDANG TELEKOMUNIKASI
 - Pengawasan, pengendalian dan penertiban bidang telekomunikasi
13. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN E-GOVERNMENT
 - Pembinaan dan pengembangan aplikasi layanan publik
 - Implementasi open source
 - Operasional layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
 - Pelaksanaan audit TIK
 - Pengembangan dan pengelolaan probolinggo command center
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi berbasis masyarakat
 - Pembinaan dan pengembangan e- government
14. PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI
 - Penyampaian ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat
15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
 - Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Data Statistik Daerah

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif selama tahun 2018 dan sekaligus sebagai dasar pembuatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja, dapat menjadi komitmen bersama dalam pelaksanaan Rencana Kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh organisasi.